

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Program pengelolaan informasi dan komunikasi merupakan upaya yang dilakukan pemerintah Kota Padang Panjang untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan transparansi kepada masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pembangunan dan kebijakan pemerintah. Pelaksanaan program ini sejalan dengan peningkatan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Keterbukaan informasi publik sudah menjadi hak masyarakat sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (IKP).

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi dan mengkarakterisasi efektivitas manajemen informasi dan komunikasi publik Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai fungsi keterbukaan informasi. Kota Padang Panjang menggunakan teori Efektivitas Program Campbell J.P dengan variabel utamanya yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat *input* dan *output*, dan pencapaian menyeluruh.

Secara keseluruhan program pengelolaan informasi dan komunikasi di Diskominfo Padang Panjang telah menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik dalam mendukung penerapan keterbukaan informasi. Di lihat dari pencapaian tujuan secara menyeluruh diskominfo telah meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas informasi publik dengan memanfaatkan media sosial dan pemberian

layanan secara langsung, hal ini dilihat dari peningkatan jumlah informasi yang dipublikasikan.

Pelaksanaan Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik dalam pemenuhan hak masyarakat tersebut belum dapat dikatakan sepenuhnya efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih belum terpenuhinya kebutuhan akan sumber daya manusia yang belum terpenuhi dari segi kualitas maupun kuantitas. Selain itu, dapat dilihat pada kepuasan program yang diukur berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyampaian informasi yang dilakukan oleh diskominfo pada media sosial maupun yang dilakukan secara konvensional yang belum sepenuhnya merasa puas dengan konten-konten yang di informasikan.

Pelaksanaan yang kurang terjadi karena adanya kendala dalam pelaksanaan program. Sejauh ini yang menjadi kendala yaitu dari pengumpulan data yang memerlukan validias dan melalui proses yang panjang sehingga terkadang informasi akan memakan waktu untuk disebarakan. Tanggapan dan partisipasi masyarakat diperlukan dalam perbaikan pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi kedepannya, sehingga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi seluh masyarakat di Kota Padang Panjang.

6.2 Saran

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut sebagai berikut:

1. Dinas Komunikasi dan Informasi Kora Padang Panjang perlu untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia khususnya dalam hal

pengelolaan digital, penulisan konten informatif pada penyampaian informasi media sosial.

2. Melakukan kegiatan literasi digital kepada seluruh lapisan masyarakat secara merata tidak hanya melalui mobil informasi keliling, namun juga dilakukan dengan sosialisasi secara tatap muka atau dengan webinar, sehingga informasi yang disampaikan menjangkau semua lapisan masyarakat.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana perlu ditingkatkan untuk mempercepat penyebaran informasi, seperti penyediaan mobil informasi yang ditambah, maupun dengan melakukan penyebaran informasi dengan papan reklame secara merata.
4. Sebaiknya Dinas Komunikasi dan Informasi memiliki kebebasan dan diberikan anggaran untuk melakukan pelatihan dan tidak hanya menunggu pengadaan pelatihan dari BKPSDM. Karena memiliki kebutuhan akan keahlian untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

